



Semanggi

Kabar **FRAKSI PKS** DPRD KOTA SURABAYA



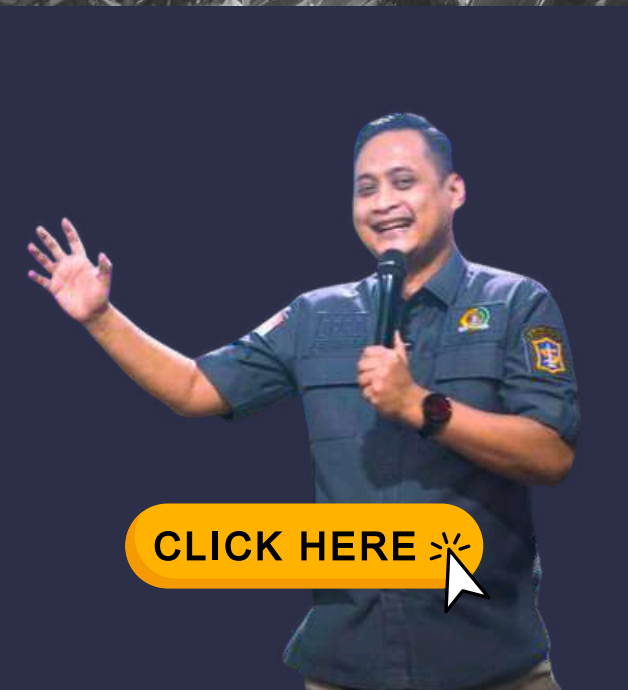
FRAKSI PKS

Dukung Wali Kota Surabaya Genjot PAB



DPRD SURABAYA DESAK PEMKOT

Perketat Pengawasan Pangan Jelang Lonjakan Permintaan Nataru



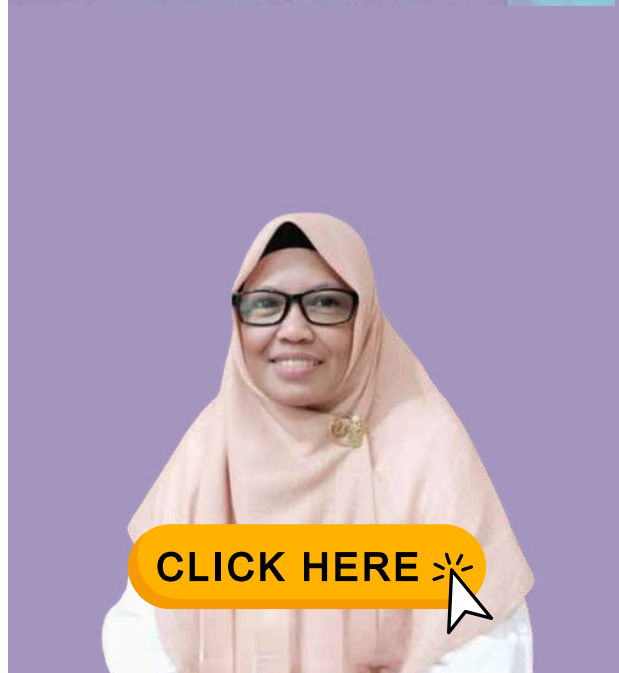
CLICK HERE



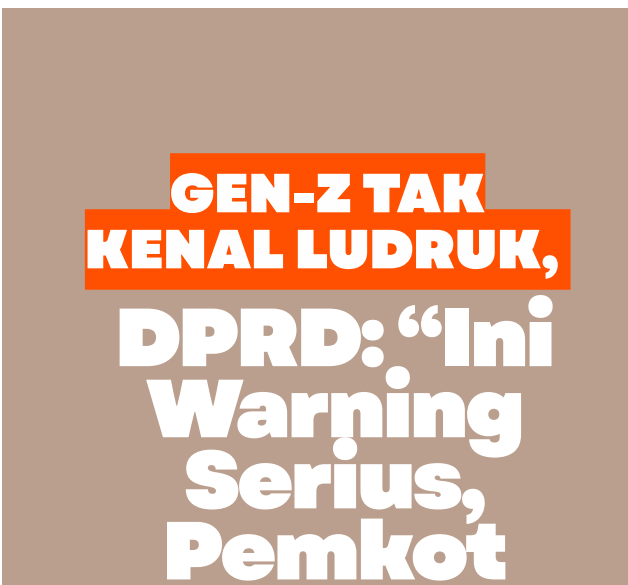
ANING RAHMAWATI:

Raperda Banjir Harus Perketat Pengawasan Sejak PBG Diterbitkan

CLICK HERE



CLICK HERE



GEN-Z TAK KENAL LUDRUK,

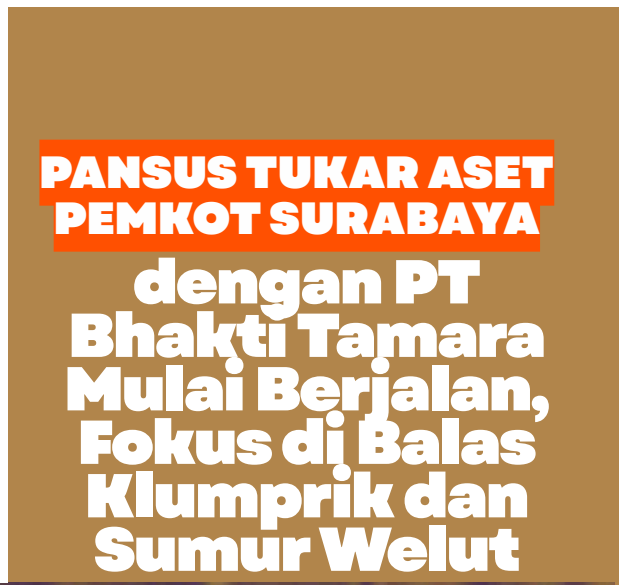
DPRD: “Ini Warning Serius, Pemkot Jangan Diam!”



CLICK HERE



CLICK HERE



PANSUS TUKAR ASET PEMKOT SURABAYA

dengan PT Bhakti Tamara Mulai Berjalan, Fokus di Balas Klumprik dan Sumur Welut



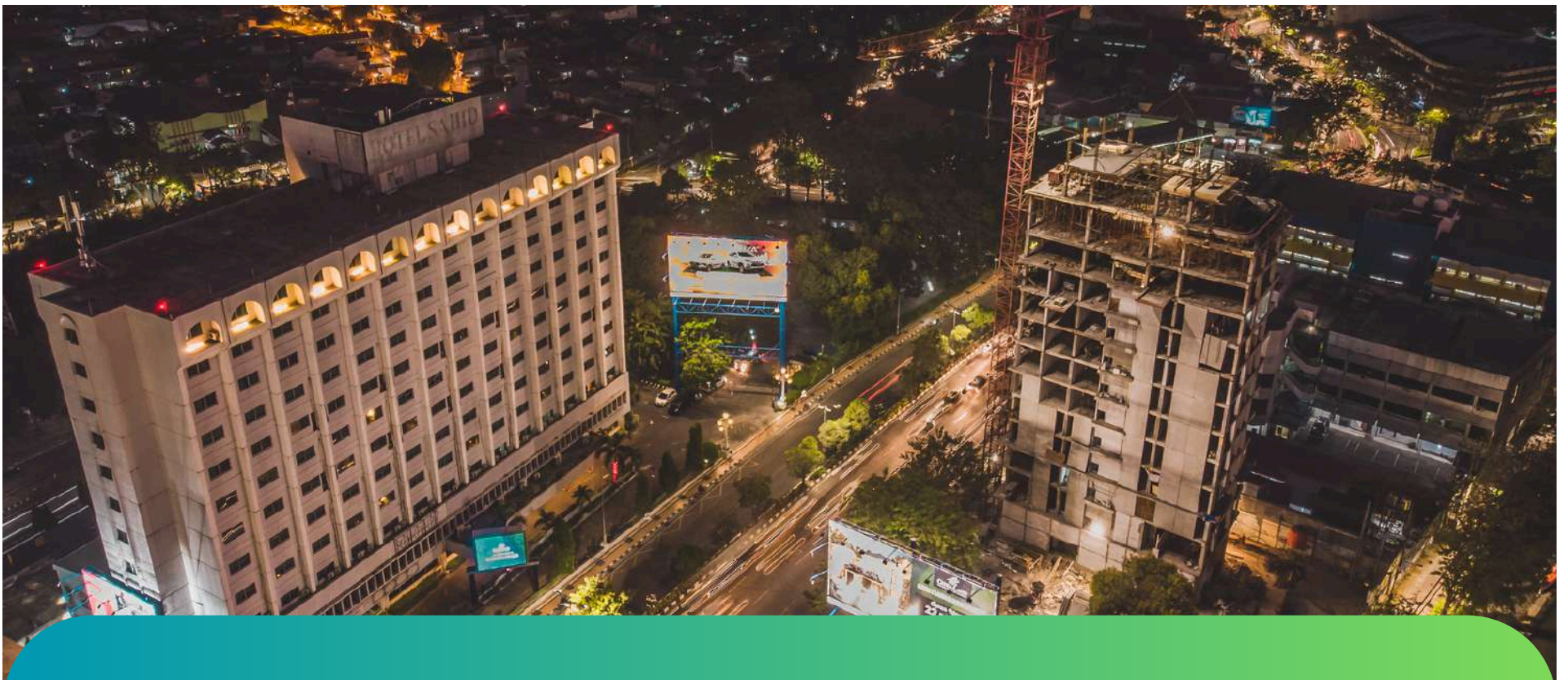
pkspdprdsurabaya



pkstvdprdsurabaya



fraksi.pks-surabaya.or.id



FRAKSI PKS

**Dukung
Wali Kota
Surabaya
Genjot
PAD**



Cahyo Siswo Utomo, ST., MH.
Ketua Fraksi PKS & Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya

Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, mendukung langkah Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengoptimalkan aset dan penambahan titik reklame untuk menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD.

“Kita mendukung juga mendorong Pemkot Surabaya untuk mempunyai kreativitas dalam menambah pendapatan PAD,” kata Cahyo, Senin (17/11).

Cahyo memaparkan kreativitas pemkot menggenjot penambahan PAD sangat urgen. Sebab pemerintah pusat melakukan pemotongan transfer dana daerah hingga mencapai Rp1,3 triliun.

Kendati begitu, Cahyo mengimbau pemkot tidak hanya fokus mengoptimalkan aset dan reklame saja, namun juga menyasar sektor PBB.

“Jadi ada anggaran yang kurang dari pusat sekitar Rp1,3 triliun. Kalau Pemkot ingin menguatkan aset dan titik reklame itu mungkin juga bisa selain tetap fokus pada sektor pajak PBB yang masih tinggi.” tutur Cahyo.

Maka dari itu, Cahyo mengimbau Pemkot benar-benar serius melakukan optimalisasi itu, karena banyaknya aset yang belum dikelola secara maksimal.

Misalnya membikin tenan besar asalkan tidak bertentangan dengan peraturan daerah maupun perundang-undangan yang berlaku.

“

**Aset pemerintah kota itu juga cukup banyak, bisa lebih kreatif untuk dioptimalkan. Misalnya tenan-tenan besar mungkin ada berinvestasi disewakan sepanjang itu tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.”
tutur Cahyo.**



Sedangkan untuk penambahan titik reklame, Cahyo mengingatkan Pemkot mengacu pada peraturan lingkungan hijau dan peraturan lainnya.

“Kalau titik reklame, iya tapi kita juga harus tetap berpedoman pada peraturan terkait dengan lingkungan hijau dan sebagainya itu yang pernah saya sampaikan di waktu sebelumnya.” demikian Cahyo Siswo Utomo.

Seperti diketahui, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menjelaskan proyeksi PAD tahun 2026 sekitar Rp8 triliun, akan didorong melalui optimalisasi aset daerah dan peningkatan pendapatan dari sektor pajak reklame.

“

Jadi dari setiap tahun kan kita (PAD) sekitar Rp8 triliun, tapi nanti insyaAllah di tahun depan kita akan banyak melakukan terkait dengan (optimalisasi) aset yang akan kita gunakan. Jadi jangan sampai mangkrak, disewakan,” katanya.



Selain itu, Wali Kota Eri menyebut, Pemkot Surabaya juga akan menambah titik reklame sebagai salah satu langkah strategis untuk menggenjot pendapatan daerah.

“Yang kedua kita akan menaikkan (PAD) dari reklame. Jadi nanti di posisi jalan itu bisa neon box sehingga bisa terang, tapi yang bayar listrik bukan kita, tapi kita mendapatkan (dari) pendapatan,” jelasnya. [dre.hel]

**ANING
RAHMAWATI:**

Raperda Banjir Harus Perketat Pengawasan Sejak PBG Diterbitkan



Hj. Aning Rahmawati, S.T.

Wakil Ketua Komisi C - DPRD Kota Surabaya
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya

SURABAYA – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penanganan dan Penanggulangan Banjir DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, menegaskan pentingnya penguatan pengawasan pembangunan sejak tahap perizinan awal melalui Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Penegasan tersebut disampaikan Aning dalam rapat Pansus Raperda Penanganan dan Penanggulangan Banjir yang digelar Komisi C DPRD Surabaya bersama organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Surabaya serta pakar dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Senin (15/12/2025).

Menurut Aning, selama ini persoalan banjir kerap dipicu lemahnya pengendalian pembangunan, khususnya terkait kewajiban penyediaan infrastruktur pengendali air oleh pengembang. Akibatnya, saat penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), kualitas drainase maupun kolam tampung air sering tidak sesuai standar.

“

Raperda ini ingin memastikan pengawasan dilakukan sejak awal. Harapannya, sebelum PBG diterbitkan, kewajiban seperti pembangunan kolam tampung air dan sistem drainase sudah dipenuhi. Jangan sampai dibangun dulu, baru dipikirkan dampaknya,” tegas Aning.



Ia menilai penguatan regulasi dalam Raperda ini menjadi langkah penting agar penanganan banjir tidak lagi bersifat reaktif, melainkan preventif melalui penataan pembangunan yang tertib dan berkelanjutan.

Pembahasan Pansus juga menyoroti perubahan sistem perizinan bangunan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung. Perwakilan Bapedalitbang Pemkot Surabaya, Dwija, menjelaskan bahwa PBG secara normatif merupakan izin awal sebelum pembangunan dilaksanakan, sementara Sertifikat Laik Fungsi (SLF) menjadi instrumen pengendalian pemanfaatan bangunan.

“Bangunan tidak boleh difungsikan sebelum mengantongi SLF. Jika rekomendasi teknis seperti drainase dan tampungan air tidak terpenuhi, SLF tidak akan diterbitkan,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Pemkot Surabaya, Rizki, menekankan pentingnya kesesuaian pembangunan dengan rencana awal pengembang. Menurutnya, infrastruktur seharusnya menjadi syarat utama dalam pengajuan PBG agar proses pengawasan dan penyerahan PSU berjalan lebih mudah.

Dari sisi teknis, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya menyampaikan bahwa rekomendasi drainase menitikberatkan pada pemenuhan volume tampungan air sebagai upaya pengendalian banjir.

Aning Rahmawati menambahkan, Raperda Penanganan dan Penanggulangan Banjir diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam mengawasi pembangunan, terutama di kawasan padat dan rawan genangan.

“

Dengan pengawasan yang kuat sejak perizinan, risiko banjir bisa ditekan dan warga Surabaya mendapatkan perlindungan yang lebih baik,” pungkasnya. (dims)



DPRD SURABAYA DESAK PEMKOT

Perketat Pengawasan Pangan Jelang Lonjakan Permintaan Nataru



Hj. Enny Minarsih

Anggota Komisi B, Ketua BAPEMPERDA &
Bendahara Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya

SURABAYA - Menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026, DPRD Kota Surabaya melalui Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Enny Minarsih, memberikan desakan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk memperketat pengawasan terhadap peredaran pangan di wilayah kota. Hal ini dilakukan menyusul perkiraan lonjakan permintaan produk pangan pokok yang signifikan dari masyarakat di pasar tradisional dan pusat perbelanjaan modern.

Enny Minarsih menilai, setiap menjelang Nataru permintaan masyarakat terhadap komoditas pangan meningkat drastis, sehingga potensi beredarnya produk yang mendekati masa kedaluwarsa atau stok lama yang tidak layak konsumsi menjadi lebih besar. Ia menekankan bahwa keselamatan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pengawasan. Risiko terhadap produk pangan kadaluwarsa antara lain dapat mencakup keracunan hingga dampak negatif jangka panjang bagi kesehatan warga.

Untuk itu, Enny meminta agar dinas-dinas terkait, khususnya yang menangani ketahanan pangan, tidak hanya menunggu laporan konsumen, tetapi harus aktif turun ke lapangan melakukan pengecekan tanggal kedaluwarsa barang, operasi pasar dan inspeksi langsung ke berbagai titik perdagangan.

Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk menjamin agar seluruh produk pangan yang beredar di pasaran benar-benar aman, layak dikonsumsi, serta berkualitas baik.



Enny juga mengaitkan pengawasan pangan dengan upaya pemkot dalam memperkuat ketahanan pangan di Surabaya. Ia berharap sinergi yang kuat antara lembaga legislatif, eksekutif, dan partisipasi masyarakat dapat menciptakan momen Nataru yang aman, sehat, serta minim masalah kesehatan akibat pangan tidak layak.

Sementara itu, Pemkot Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah menyatakan bahwa stok kebutuhan pokok masih aman dan harga relatif stabil meski beberapa komoditas tertentu seperti cabai rawit mengalami kenaikan harga yang dipengaruhi oleh faktor cuaca dan pasokan.

Pemerintah kota juga berencana memperluas pemantauan, termasuk terhadap produk pangan yang dijual di berbagai pasar guna memastikan tidak adanya produk kadaluwarsa yang dipasarkan kepada konsumen.

Dengan meningkatnya mobilitas dan aktivitas masyarakat menjelang libur panjang Nataru, langkah pengawasan ini dinilai sangat krusial dalam menjaga kualitas dan ketersediaan pangan, sekaligus melindungi warga dari potensi bahaya konsumsi pangan tidak layak. (dms)

**GEN-Z TAK KENAL
LUDRUK,**

**DPRD: “Ini
Warning
Serius,
Pemkot
Jangan
Diam!”**



H. Johari Mustawan, S.T.P., M.A.R.S.

Komisi D DPRD Kota Surabaya - Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya

NAWACITAPOST.COM — Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar hearing bersama Paguyuban Budaya Bumi Laras Manunggal pada Kamis (20/11) untuk membahas masukan terkait penyusunan Raperda Kepahlawanan dan Kebudayaan Kota Surabaya.

Pertemuan ini menjadi ruang evaluasi sekaligus alarm keras mengenai kondisi budaya lokal yang dinilai kian terabaikan di tengah derasnya pengaruh global.

Ketua Paguyuban Budaya Bumi Laras Manunggal, Adam Suwito, SH, MH, menegaskan pentingnya payung hukum agar eksistensi budaya Surabaya dan Jawa Timur tidak terus tergerus zaman.

“Pentingnya disusun Raperda Kebudayaan agar generasi Gen-Z bisa mengetahui jenis-jenis budaya apa saja yang ada saat ini, khususnya budaya dari Kota Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya,” ujarnya.

Adam membeberkan fakta di lapangan bahwa generasi muda kini jauh dari budaya lokal.

“Saya pernah melakukan survei kecil-kecilan kepada beberapa anak muda, saya tanya kepada mereka apakah mereka tahu apa itu ludruk? Mereka jawab tidak tahu. Lalu saya tanya lagi, kalau tari remo, tahu tidak? Ternyata sama, mereka juga tidak tahu. Tapi kalau ditanya Blackpink, mereka langsung tahu,” jelasnya.

Menurutnya, fenomena tersebut bukan sekadar ironi, melainkan ancaman masa depan budaya daerah.

“Anak-anak muda zaman sekarang banyak yang lebih mengenal Blackpink daripada ludruk, campursari ataupun yang lain. Ini yang menjadi kekhawatiran kami,” katanya.

“

Dalam 5 tahun ke depan bisa jadi generasi-generasi muda yang akan datang sudah sama sekali tidak tahu apa saja budaya yang ada di Kota Surabaya.”

Adam berharap agar edukasi dan sosialisasi budaya masuk dalam aturan yang dibahas.

“Untuk itu kami berharap dalam Raperda Kebudayaan, Pemerintah Kota bisa mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya kepada generasi muda,” tegasnya.

Ia juga mengusulkan format kegiatan yang konsisten, bukan hanya seremonial.

“Perlombaan-perlombaan dan festival-festival budaya perlu diadakan secara rutin, bukan hanya sekadar acara seremonial dalam event tertentu saja,” ujarnya.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Johari Mustawan, menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan masukan serius dari paguyuban tersebut.

“Kami apresiasi kepada Paguyuban Budaya Bumi Laras Manunggal yang hari ini hadir untuk memberikan masukan-masukan kepada Raperda Kepahlawanan, Perjuangan serta Budaya,” ujar Johari.

Ia menegaskan bahwa penguatan budaya harus dimulai sejak anak masih di usia pendidikan dasar.

“Kebudayaan perlu dikenalkan sejak dini, kalau perlu sejak PAUD sudah diperkenalkan, sehingga semangat budaya tidak luntur di tengah era globalisasi saat ini,” tegasnya.

Menurutnya, Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan wajib menindaklanjuti secara sistematis.

“Ini perlu ditindaklanjuti segera oleh Dinas Pendidikan terkait adanya kurikulum budaya di kalangan anak-anak sekolah untuk mengenal budaya Kota Surabaya,” ujarnya.

Johari juga menyoroti adanya ketidakadilan dalam fasilitas pemerintah terhadap komunitas budaya.

“Banyak temuan-temuan di lapangan, pemerintah hanya memfasilitasi paguyuban-paguyuban budaya tertentu saja,” ujar Bang Jo, sapaan akrabnya.

Ia menegaskan bahwa keberadaan budaya rakyat seperti sedekah bumi dan ludruk harus mendapat ruang dan dukungan penuh.

“Kegiatan-kegiatan ini perlu mendapat perhatian dan bisa difasilitasi oleh Pemerintah Kota, agar budaya di Kota Surabaya tidak meredup dan menghilang,” tutupnya.



PANSUS TUKAR ASET PEMKOT SURABAYA

dengan PT Bhakti Tamara Mulai Berjalan, Fokus di Balas Klumprik dan Sumur Welut



H. Faris Abidin, S.Pi.

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya

Surabaya, petisi.co – Pansus penanganan penukaran aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan PT Bhakti Tamara telah mulai dilaksanakan sejak minggu kemarin, dengan satu pertemuan pertama telah dilaksanakan.

Ketua Pansus, Faris Abidin, menyampaikan bahwa arah utama penukaran adalah pertukaran aset yang dimiliki Pemkot dengan aset tanah milik PT Bhakti Tamara.

“Lokasi wilayah yang akan menjadi cakupan penukaran ada di Balas Klumprik dan Sumur Welut, dengan beberapa titik konkret yang akan ditentukan lebih lanjut,” ujar Faris, pada Senin (15/12/2025)

Menurut Faris, informasi detail mengenai perhitungan, nilai objek, dan aset-aset yang akan ditukar masih dalam proses pengkajian mendalam oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Nilai konkret dan realitas sesungguhnya masih dihitungkan oleh BPKAD, terutama nilai aset Pemkot saat ini,” jelasnya.

Selain itu, Pemkot juga telah meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk mendalami penggunaan aset yang akan ditukar nantinya.

Saat ini, aset yang akan ditukar masih berupa lahan kosong, namun bentuk pemanfaatannya belum ditentukan dan membutuhkan waktu lebih lama untuk diputuskan.

“

Sejauh ini kendala yang signifikan belum ada, proses masih berjalan sesuai peraturan daerah (perda) dengan penyusunan yang sedang dilakukan. Harapan kita, aset yang ditukar bisa digunakan untuk kebermanfaatan warga Kota Surabaya,” tegas Faris.



Pansus juga akan melaksanakan pertemuan-pertemuan berikutnya untuk mendalami lebih jauh semua aspek penukaran ini. (joe)

Majalah Digital *Semanggi*



FRAKSI PKS DPRD KOTA SURABAYA

update selalu di media sosial kami



pkspdprdsurabaya



pkstvdprdsurabaya



fraksi.pks-surabaya.or.id